

**MENENTUKAN KONDISI KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT WILAYAH IV  
MENGUNAKAN *FOOD SECURITY QUOTIENT* (FSQ)**

***DETERMINING FOOD SECURITY CONDITION IN WEST JAVA SECTOR IV USING  
FOOD SECURITY QUOTIENT METHOD***

**Rakha Zahra Raihan<sup>\*1</sup>, Roni Kastaman<sup>2</sup>, Tensiska<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Teknologi Industri Pertanian – Fakultas Teknologi Industri Pertanian –  
Universitas Padjajaran

\*Penulis korespondensi: rakha15001@mail.unpad.ac.id

**ABSTRACT**

*Food security is a condition of fulfilling food for the state up to individuals, which is reflected in the availability of sufficient food, both in quantity and quality, safe, diverse, nutritious, equitable and affordable and does not conflict with the religion, beliefs, and culture of society, to be able to live healthy, active and productive in a sustainable manner. Food security has 3 important indicators, namely food availability, food access and food quality. Food availability means food must be available from natural sources either through food production, cultivation of land or livestock, or by other means of obtaining food, such as fishing, hunting or gathering food. Food access means that economic and physical access to food must be guaranteed. Economic accessibility means food prices must be affordable. Food quality means that the food must be nutritious and the condition of the people who can absorb nutrients from the food itself. Food security quotient (FSQ) is a modification of the Location quotient (LQ) method which can be used to determine the leading commodities so that they can choose variables to be prioritized and not to be prioritized. The FSQ method is using variables that affect the 3 indicators of food security. The average condition of food security in West Java Region IV is in a food-resistant condition with an FSQ value of 0.951. Areas with very food-resistant conditions are Garut Regency, Bandung Regency, Tasikmalaya Regency and Sumedang Regency. Areas with food-resistant conditions are Ciamis Regency, West Bandung Regency, Pangandaran Regency, Bandung City, Cimahi City, Tasikmalaya City and Banjar City. However, if we look deeper, there are still many variables from these regions that still need treatment and strategies to support food security.*

**Keywords:** *Food Security, Availability, Access, Quality, West Java Region IV*

**ABSTRAK**

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan mempunyai 3 indikator penting yaitu ketersediaan pangan, akses pangan serta mutu pangan. Ketersediaan pangan artinya pangan harus tersedia dari sumber alami baik melalui produksi pangan, penggarapan lahan atau peternakan, atau dengan cara lain untuk memperoleh pangan, seperti memancing, berburu atau mengumpulkan makanan. Akses pangan artinya akses ekonomi dan fisik kepada pangan harus dijamin. Aksesibilitas ekonomi berarti harga pangan harus terjangkau. Mutu pangan artinya pangan

tersebut harus bergizi dan kondisi masyarakatnya yang dapat menyerap gizi dari pangan itu sendiri. *Food security quotient* (FSQ) merupakan modifikasi dari metode *Location quotient* (LQ) yang dapat menentukan komoditas basis agar dapat memilih memilah variabel yang diprioritaskan dan tidak diprioritaskan namun menggunakan variabel yang berpengaruh pada 3 indikator ketahanan pangan tersebut. Rata - rata kondisi ketahanan pangan Jawa Barat Wilayah IV berada pada kondisi tahan pangan dengan nilai FSQ 0,951. Daerah dengan kondisi sangat tahan pangan yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sumedang. Daerah dengan kondisi tahan pangan yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Namun jika ditilik lebih dalam, masih banyak variabel - variabel dari daerah - daerah tersebut yang masih butuh penanganan dan strategi untuk menunjang ketahanan pangan.

**Kata kunci:** Ketahanan Pangan, Ketersediaan, Akses, Mutu, Jawa Barat IV

## PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu:

- a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan
- b. Keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. Pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan.

Dengan mengacu pada sistem Ketahanan Pangan tersebut, penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global. (PP No 14 Tahun 2015, 2015)

Jawa Barat Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV terdiri dari Kabupaten Bandung , Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan yang paling baru adalah Kabupaten Pangandaran. Wilayah IV meliputi 7 Kabupaten dan 4 Kota dengan luas 13.134,07 Km<sup>2</sup> (BPS Provinsi Jawa Barat, 2018)

Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari variabel - variabel yang terus berubah secara dinamis. Dinamika dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Penentuan ketahanan pangan Jawa Barat wilayah IV diperlukan untuk membantu para pengambil keputusan dan pemangku kebijakan dalam merencanakan dan menyusun strategi

penanganan masalah ketahanan pangan secara spesifik per daerah agar tepat sasaran dan tepat perlakuan. Hasil penentuan kondisi ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk model tabulasi dari ketiga indikator maupun secara komprehensif.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dan korelasional. Metode deskriptif yaitu metode untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode korelasional adalah metode kelanjutan dari metode deskriptif yang mempunyai tujuan mencari hubungan secara sistematis antara variabel – variabel yang diteliti (Nasir, 1999).

Pengumpulan data penelitian diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diambil dari data Badan Pusat Statistik dari tahun 2017 dan 2018 (Jawa Barat dalam angka) dan data yang berasal dari beberapa lembaga / badan terkait dengan ketahanan pangan yaitu Badan Koordinasi Wilayah IV, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Badan Ketahanan Pangan, BULOG, Dinas Pasar, Dinas perdagangan dan Perindustrian, Bappeda baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota Jawa Barat Wilayah IV.

Penggunaan variabel – variabel pengukur untuk menentukan ketahanan pangan suatu daerah dibutuhkan disini karena variabel – variabel pengukur tersebut merupakan bentuk kuantifikasi / angka yang merepresentasikan keadaan yang ada di dalam sistem ketahanan pangan setiap daerahnya.

Variabel yang dihasilkan ini selanjutnya diisi sesuai daerahnya masing – masing menggunakan data pokok dari BPS dan data lain dari lembaga / Instansi terkait. Selanjutnya hasil pemasukkan data digunakan untuk menilai kondisi masing-masing tingkat ketahanan pangan kabupaten / kota akan menghasilkan nilai masing-masing indikator (ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan dan, mutu pangan). Teknik yang digunakan untuk menganalisis kondisi masing-masing indikator ketahanan pangan adalah modifikasi dari *Location Quotient* (LQ). Alasan penggunaan metode LQ untuk mengukur ketahanan pangan dikarenakan metode ini dapat menentukan komoditas basis agar dapat memilih dan memilah variabel yang diprioritaskan serta tidak diprioritaskan yang digunakan sebagai kumulatif sehingga dapat dilihat perbandingan komparasi antara satu kabupaten / kota dengan Provinsi Jawa Barat. Variabel yang diambil bukan variabel komoditas, melainkan variabel yang berpengaruh terhadap ketiga indikator yaitu ketersediaan, akses dan mutu pangan. Maka dilakukan modifikasi dari metode *Location quotient* (LQ) menjadi *Food Security Quotient* (FSQ). Persamaan yang dipergunakan dalam FSQ adalah :

$$FSQ = \frac{Xr/RVr}{Xn/RVn} \text{ atau } FSQ = \frac{Xr/Xn}{Xr/RVn}$$

Nilai FSQ yang didapat akan menunjukkan tingkat kondisi ketahanan pangan suatu wilayah sesuai dengan indikatornya. Hasil perhitungan *FSQ* dibagi menjadi 5 kategori dikarenakan agar lebih spesifik kondisi ketahanan pangan pada setiap daerahnya, yaitu :

- Nilai FSQ dari  $\leq 0,25$  termasuk ke dalam sangat rawan / sangat tidak tahan pangan
- Nilai FSQ dari  $> 0,25 - 0,5$  termasuk ke dalam rawan / tidak tahan pangan
- Nilai FSQ dari  $> 0,5 - 0,75$  termasuk ke dalam sedang
- Nilai FSQ dari  $> 0,75 - 1$  termasuk ke dalam aman / tahan pangan
- Nilai FSQ dari  $> 1$  termasuk ke dalam sangat aman / sangat tahan pangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menggunakan perhitungan *Food security quotient* pada Jawa Barat wilayah IV akan ditampilkan melalui tabel dengan masing – masing variabel pada tiap indikatornya. Kode kabupaten/kota sebagai berikut: (a)Kabupaten Bandung, (b) Kabupaten Garut, (c)Kabupaten Tasikmalaya, (d)Kabupaten Ciamis, (e)Kabupaten Ciamis,(f)Kabupaten Bandung Barat, (g)Kabupaten Pangandaran, (h)Kota Bandung, (i)Kota Cimahi, (j)Kota Tasikmalaya, (k)Kota Banjar.

### Ketersediaan

Dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2012 tertulis bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan menitik beratkan pada adanya pangan secara fisik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan bagi masyarakat.

Ketersediaan pangan di Jawa Barat Wilayah IV diukur menggunakan 22 variabel yang berkaitan dengan ketersediaan pangan dalam memenuhi ketahanan pangan. Variabelnya mencakup produksi, produktivitas, luas panen dan produksi/kapita bahan pokok pangan masyarakat Jawa Barat (padi,kedelai,jagung,ubi jalar dan ubi kayu) serta memasukan variabel kepadatan penduduk per kota/kabupaten dan air sawah yang mendapatkan air irigasi.

Variabel ketersediaan terdiri dari (1)Produksi Padi, (2)Produksi Jagung, (3)Produksi Ubi Kayu, (4)Produksi Kedelai, (5)Produksi Ubi Jalar, (6)Produksi Padi Kapita, (7)Produksi Jagung/Kapita, (8)Produksi Ubi Kayu/Kapita, (9)Produksi Kedelai/Kapita, (10)Produksi Ubi Jalar/Kapita, (11)Luas Panen Padi, (12)Produktivitas Padi, (13)Produktivitas Ubi Kayu, (14)Produktivitas Ubi Jalar, (15)Produktivitas Jagung, (16)Produktivitas Kedelai, (17)Luas Panen Jagung, (18)Luas Panen Kedelai, (19)Luas panen Ubi kayu, (20)Luas panen ubi jalar, (21)Kepadatan Penduduk Jawa Barat/ Kab/ Kota per Km, (22)Luas Lahan yang mendapatkan Air Irigasi, (23)Presentase rumah tangga yang berusaha di bidang pertanian.

Indikator ketersediaan berkaitan dengan tersedianya pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ketersediaan pangan akan dibagi kedalam 5 kondisi yaitu sangat rawan pangan, rawan pangan, sedang, aman pangan dan sangat aman pangan. Semakin tinggi nilai FSQnya maka daerah tersebut dapat dikatakan mempunyai persediaan pangan untuk masyarakatnya.

Tabel 1. Hasil Perhitungan FSQ Ketersediaan Pangan

Variabel	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	1,295	0,596	1,031	0,674	0,844	1,664	0,371	0,051	0,007	0,309	0,115
2	2,547	4,270	1,184	0,425	1,133	0,592	0,144	0,000	0,003	0,002	0,088
3	1,542	3,218	1,867	1,372	1,511	0,726	0,086	0,023	0,157	0,291	0,014
4	0,486	2,953	1,956	1,060	0,525	0,338	0,194	0,000	0,000	0,283	0,606
5	1,246	2,097	0,725	0,247	1,047	0,291	0,041	0,040	0,334	0,028	0,083
6	0,558	0,363	0,930	0,899	1,160	1,574	1,442	0,032	0,019	0,736	0,996
7	1,320	3,128	1,285	0,682	1,874	0,673	0,672	0,000	0,011	0,007	0,914
8	0,821	2,421	2,080	2,261	2,567	0,848	0,414	0,018	0,510	0,856	0,145

Tabel 1. Lanjutan

Variabel	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
9	0,221	1,896	1,861	1,490	0,761	0,338	0,797	0,000	0,000	0,712	5,522	
10	0,541	1,287	0,660	0,332	1,450	0,277	0,161	0,025	0,883	0,068	0,727	
11	1,308	0,637	1,010	0,720	0,868	1,768	0,396	0,044	0,017	0,317	0,111	
12	0,955	0,317	0,618	0,819	0,725	0,970	0,956	2,849	2,281	1,987	1,407	
13	0,921	0,369	0,747	1,145	0,616	0,822	1,011	4,570	4,171	2,379	1,129	
14	0,689	0,276	0,544	0,460	0,977	0,870	0,701	3,387	3,175	1,503	1,190	
15	1,194	0,450	0,735	1,016	0,836	1,306	1,272	0,000	0,326	1,710	1,649	
16	1,181	0,988	0,891	1,328	1,433	1,268	1,515	0,000	0,000	1,511	1,521	
17	2,604	4,061	1,234	0,463	1,277	0,590	0,146	0,000	0,070	0,004	0,091	
18	0,594	1,513	1,988	1,044	0,408	0,411	0,196	0,000	0,000	0,572	0,807	
19	1,672	3,056	1,565	1,084	1,891	0,941	0,090	0,013	0,209	0,258	0,017	
20	1,696	2,504	0,785	0,456	0,776	0,335	0,058	0,028	0,549	0,037	0,092	
21	0,568	0,489	1,075	1,274	1,204	0,957	3,097	0,202	0,436	0,692	1,025	
22	1,115	0,457	0,771	0,864	0,737	0,476	0,608	0,065	0,026	0,443	0,162	
23	0,829	0,588	1,014	1,653	1,084	1,282	2,177	0,108	0,688	0,579	1,104	
Rata-rata	1,126	1,649	1,155	0,946	1,118	0,840	0,719	0,498	0,603	0,665	0,849	
Rata – rata ketersediaan pangan							0,924					

Hasil perhitungan FSQ dengan nilai paling tinggi yaitu 1,649 yang berarti termasuk kondisi sangat aman pangan dimiliki Kabupaten Garut dikarenakan angka produksi, produktivitas, luas panen dan produksi/ kapita bahan pangan pokok yang tinggi dan dengan kepadatan penduduk 842 jiwa/km<sup>2</sup>. Sehingga terjaminnya ketersediaan / adanya bahan pangan pokok untuk seluruh masyarakatnya. Keunggulan Garut terdapat pada komoditas jagungnya yang mendapatkan nilai untuk produksi 4,27 dan luas panennya dengan nilai 4,061 (BPS Provinsi Jawa Barat, 2018).

Sementara nilai FSQ terkecil yaitu 0,498 yang berarti termasuk kondisi rawan pangan dimiliki Kota Bandung. Kota Bandung memiliki banyak nilai minim pada hampir seluruh variabel kecuali produktivitas padi, ubi kayu dan ubi jalar. Kota Bandung tidak memiliki lahan pertanian yang luas sehingga untuk pemenuhan ketersediaan bahan pangan bekerja sama dengan daerah sekitarnya.

### Akses

Agar pangan yang disediakan mampu dikonsumsi oleh rumah tangga atau perseorangan maka diperlukan suatu analisis terkait dengan akses atau distribusi pangan. Akses pangan merupakan salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan. Akses pangan baik apabila semua rumah tangga atau semua anggota rumah tangga mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendapatkan pangan yang cukup pula baik dari segi kuantitatif, kualitatif dan keragaman pangan. Dalam indikator akses pangan terdapat 11 variabel yang semuanya mempunyai keterkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap pangan untuk dikonsumsi.

Variabel akses terdiri dari (1) Persentase Penduduk Yang Produktif (15 - 64), (2) Persentase Jumlah Masyarakat Bekerja, (3) Rata-rata lama sekolah masyarakat, (4) Persentase

Penduduk Mampu, (5)Persentase RT dengan akses listrik, (6)Rata-rata Pangsa Pengeluaran Pangan, (7)Penduduk Bekerja, (8)Indeks Pembangunan Manusia, (9)Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan, (10)Panjang Jalan (Negara, Provinsi, Kabupaten), (11)Panjang jalan kondisi Teraspal baik (Negara, Prov,Kab).

Indikator akses berkaitan dengan kemampuan membeli masyarakat akan pangan. Akses pangan akan dibagi kedalam 5 kondisi yaitu sangat rawan daya beli, rawan daya beli, sedang, aman daya beli dan sangat aman daya beli. Semakin tinggi nilai FSQnya maka daerah tersebut dapat dikatakan mempunyai kemampuan membeli akan pangan.

Tabel 2. Hasil Perhitungan FSQ Akses Pangan

Varia bel	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	0,890	0,965	0,956	1,008	1,024	1,046	1,112	0,914	1,132	1,089	1,102
2	0,947	1,038	1,007	1,055	1,039	1,063	1,168	0,855	1,076	1,105	1,135
3	0,934	0,914	0,855	0,940	0,994	1,011	0,992	1,102	1,431	1,194	1,154
4	0,926	1,015	0,976	1,036	1,016	1,053	1,103	0,908	1,124	1,026	1,138
5	0,908	1,039	0,991	1,026	1,030	1,080	1,114	0,862	1,079	1,093	1,113
6	0,899	0,964	0,900	0,951	1,001	1,047	1,044	0,970	1,196	1,111	1,135
7	1,889	1,424	0,995	0,811	0,685	0,954	0,344	1,262	0,387	0,417	0,123
8	0,917	0,953	0,907	1,004	1,027	1,024	1,055	0,983	1,185	1,113	1,120
9	0,885	0,747	0,713	0,878	0,976	0,856	0,946	1,366	1,217	1,028	1,099
10	1,285	1,275	1,527	1,008	1,021	0,759	0,610	1,098	0,131	0,486	0,339
11	1,417	0,539	1,202	0,872	0,821	0,635	0,333	1,648	0,122	0,540	0,469
Rata rata	1,082	0,988	1,003	0,963	0,967	0,957	0,893	1,088	0,916	0,927	0,902
Rata-rata akses pangan								0,971			

Hasil perhitungan FSQ dengan nilai paling tinggi yaitu 1,088 yang berarti termasuk kondisi sangat aman daya beli dimiliki Kota Bandung. Kota Bandung memiliki keunggulan panjang jalan yang teraspal baik, persentase penduduk produktif, persentase penduduk mampu, pangsa pengeluaran pangan yang kecil, Indeks Pembangunan Manusia dan pengeluaran/kapita dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga lebih mudahnya menjangkau / akses yang mudah terhadap pangan bagi masyarakatnya. Faktor terbesarnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi senilai 80,31% bagi masyarakat Kota Bandung membuat berhasilnya upaya untuk membangun kualitas hidup manusianya (BPS Provinsi Jawa Barat, 2018).

Sementara nilai FSQ terkecil yaitu 0,893 yang masih masuk kedalam kondisi aman daya dimiliki Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran memiliki nilai kecil pada panjang jalan teraspal baik dan jumlah penduduk yang bekerja. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah paling kecil diantara daerah lain yaitu 1.011,68 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya pun baru 405.683 jiwa (BPS Provinsi Jawa Barat, 2018).

Secara keseluruhan pada indikator akses ketahanan pangan semua kabupaten / kota memiliki nilai rata – rata 0,971 yang berarti kondisinya aman daya beli. Masyarakat mempunyai tingkat kemampuan yang cukup tinggi dalam mengakses / memperoleh pangan.

## Mutu

Mutu/Pemanfaatan/Konsumsi pangan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan. Masyarakat yang sehat pun merupakan variabel yang tak terelakkan bila berbicara mutu pangan, masyarakat sehat bersumber dari pangan yang bermutu dan bergizi, namun bila masyarakat tersebut sedang sakit maka asupan dan penyerapan gizi ke dalam tubuhnya pun tidak akan optimal.

Variabel mutu terdiri dari (1)Jumlah Puskesmas, (2)Anak Balita yang terlayani fasilitas Kesehatan, (3)Persentase Anak SD yang terlayani fasilitas Kesehatan, (4)Persentase Kecukupan Vitamin A pada bayi, (5)Angka Harapan Hidup 2017, (6)Persentase Rumah Tangga Ber Hidup Sehat, (7)Jumlah Tenaga Kesehatan, (8)Jumlah Rumah Sakit, (9)Jumlah Klinik, (10)Persentase penduduk dengan akses air minum layak, (11)Persentase Balita Tidak Underweight (Gizi buruk + Kurang gizi), (12)Persentase Balita Tidak Stunting (sangat pendek + pendek), (13)Persentase perempuan 15 tahun keatas bersekolah

Indikator mutu berkaitan dengan kesehatan dan asupan gizi masyarakat. Mutu pangan akan dibagi kedalam 5 kondisi yaitu sangat rawan gizi, rawan gizi, sedang, aman gizi dan sangat aman gizi. Semakin tinggi nilai FSQnya maka daerah tersebut dapat dikatakan mempunyai pangan yang bergizi dengan masyarakat yang sehat.

Tabel 3. Hasil Perhitungan FSQ Mutu Pangan

Varia bel	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	1,494	1,678	1,015	1,050	0,792	0,866	0,407	2,233	0,346	0,499	0,255	
2	1,212	0,640	1,461	0,384	1,147	0,759	1,223	0,871	0,581	1,451	1,264	
3	0,924	0,922	1,150	0,758	1,140	1,014	1,248	0,857	1,225	1,134	1,118	
4	1,033	1,083	1,069	1,188	1,030	1,090	1,146	0,776	1,125	1,050	1,089	
5	0,998	1,052	0,987	1,143	1,010	1,137	1,084	0,778	1,109	1,009	1,016	
6	0,897	0,881	0,912	0,818	0,965	1,122	1,233	0,851	0,990	0,852	1,364	
7	1,078	1,197	0,838	0,711	0,646	0,484	0,292	2,627	0,503	0,393	0,163	
8	0,583	0,544	0,088	0,393	0,171	0,579	0,000	2,188	0,644	1,121	0,264	
9	1,360	1,299	0,656	0,563	0,832	0,770	0,129	1,996	0,458	0,634	0,176	
10	0,953	1,096	0,863	1,389	1,173	0,923	0,727	0,719	1,156	1,102	1,216	
11	0,936	1,055	1,037	1,167	1,027	1,110	1,136	0,786	1,084	1,009	1,004	
12	0,843	0,851	0,964	1,150	1,016	1,047	1,112	0,788	1,129	0,879	1,047	
13	1,027	1,000	1,089	1,211	1,044	1,138	1,191	0,828	1,178	1,094	1,087	
Rata - rata	1,026	1,023	0,933	0,917	0,923	0,926	0,841	1,254	0,887	0,940	0,851	
Rata-rata mutu pangan							0,956					

Hasil perhitungan FSQ dengan nilai paling tinggi yaitu 1,254 yang berarti termasuk kondisi sangat aman gizi pangan dimiliki Kota Bandung. Kota Bandung memiliki keunggulan pada jumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan tenaga kesehatannya dibandingkan dengan daerah lain. Bila fasilitas kesehatan mudah dijangkau maka kesehatan masyarakatnya lebih terjamin. Kota Bandung juga memiliki tingkat angka harapan hidup paling tinggi pada Jawa Barat wilayah IV yaitu 73,86 Tahun. Kota Bandung pun memiliki perentase balita underweight terkecil yaitu 11,5% dan balita stunting sebesar 25,8% (Kemenkes RI, 2017).

Selain Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut juga memiliki kondisi sangat aman gizi dengan nilai masing – masing 1,026 dan 1,023.

Sementara nilai FSQ terkecil yaitu 0,841 yang masih masuk kedalam kondisi aman gizi dimiliki Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran memiliki nilai kecil pada jumlah fasilitas kesehatan yang masih sedikit dibandingkan dengan daerah lain. Yang harus disoroti adalah Kabupaten Garut yang mempunyai tingkat stunting sampai 43,1% yang merupakan terbesar se Indonesia pula (Kemenkes RI, 2017).

Secara keseluruhan pada indikator mutu ketahanan pangan semua kabupaten/kota memiliki nilai rata – rata 0,956 yang berarti kondisinya aman gizi. Masyarakat mempunyai tingkat kesehatan dan gizi makanan yang cukup.

### Keseluruhan

Data keseluruhan ini menghimpun dari ketiga indikator yaitu ketersediaan, akses dan mutu pangan. Semua data per kabupaten/kota telah di rata – rata kan sehingga menghasilkan data pada Tabel 4. Data keseluruhan ini mewakili kondisi ketahanan pangan pada masing – masing kota/kabupaten. Kondisi ketahanan pangan dibagi menjadi 5 sangat tidak tahan pangan, tidak tahan pangan, sedang, tahan pangan dan sangat tahan pangan. Semakin tinggi nilai FSQnya maka daerah tersebut dapat dikatakan mempunyai kondisi ketahanan pangan yang baik.

Tabel 4. Hasil Perhitungan FSQ Keseluruhan Indikator Ketahanan Pangan

Kabupaten/Kota	Kondisi Ketersediaan Pangan	Kondisi Mutu Pangan	Kondisi Akses Pangan	Kondisi Ketahanan Pangan
Kab. Bandung	Sangat Aman Pangan	Sangat Aman Gizi	Sangat Aman Daya Beli	Sangat Tahan Pangan
Kab.Garut	Sangat Aman Pangan	Sangat Aman Gizi	Sangat Aman Daya Beli	Sangat Tahan Pangan
Kab.Tasikmalaya	Sangat Aman Pangan	Aman Gizi	Sangat Aman Daya Beli	Sangat Tahan Pangan
Kab.Ciamis	Aman Pangan	Aman Gizi	Aman Daya Beli	Tahan Pangan
Kab.Sumedang	Sangat Aman Pangan	Aman Gizi	Aman Daya Beli	Sangat Tahan Pangan
Kab.Bandung Barat	Aman Pangan	Aman Gizi	Aman Daya Beli	Tahan Pangan
Kab.Pangandaran	Sedang	Aman Gizi	Aman Daya Beli	Tahan Pangan
Kota Bandung	Rawan Pangan	Sangat Aman Gizi	Sangat Aman Daya Beli	Tahan Pangan
Kota Cimahi	Sedang	Aman Gizi	Aman Daya Beli	Tahan Pangan
Kota Tasikmalaya	Sedang	Aman Gizi	Aman Daya Beli	Tahan Pangan
Kota Banjar	Aman Pangan	Aman Gizi	Aman Daya Beli	Tahan Pangan



Hasil perhitungan *Food security quotient* secara keseluruhan menunjukkan bahwa daerah dengan nilai paling tinggi yaitu 1,225 yang berarti termasuk kondisi sangat tahan pangan dimiliki Kabupaten Garut. Kabupaten Garut memiliki kondisi yang sangat aman pada ketiga indikator (ketersediaan, akses, mutu). Keunggulan Kabupaten Garut terdapat pada ketersediaan pangannya, karena Kabupaten Garut mempunyai luas lahan yang sangat besar sehingga dapat memproduksi banyak bahan pangan untuk masyarakatnya. Nilai terkecil terdapat pada Kota Cimahi yang masih dalam kondisi tahan pangan dengan nilai 0,794. Rata – rata kondisi ketahanan pangan Jawa Barat Wilayah IV adalah tahan pangan mengacu dari nilai FSQ yaitu 0,951.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah kondisi ketersediaan pangan Jawa Barat Wilayah IV yaitu aman pangan dengan nilai 0,924. Kondisi akses pangan Jawa Barat wilayah IV yaitu aman daya beli dengan nilai 0,971. Kondisi mutu pangan Jawa Barat wilayah IV yaitu aman gizi dengan nilai 0,956. Kondisi keseluruhan dari ketiga indikator ketahanan pangan Jawa Barat wilayah IV yaitu tahan pangan dengan nilai 0,951

### Saran

Saran untuk peneliti maupun pemerintah untuk selanjutnya agar dapat merumuskan strategi yang tepat sasaran setelah mengetahui kondisi ketahanan pangan dan kondisi variabel masing – masing indikator ketahanan pangan

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Jawa Barat. (2018). *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat 2018*.
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2018). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2018* (2018th ed.). Badan Pusat Statistik.
- Hendayana, R. (2003). *Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Sektor Basis Komoditas Unggulan. Informatika Pertanian*, 12(March), 57–70.
- Kemenkes RI. (2017). *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*, 140. <http://doi.org/10.3870/tzzz.2010.07.001>
- Nasir M., 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- PP No 17 Tahun 2015. (2015), 1–46.
- Soepono, P. (2001). *TEORI PERTUMBUHAN BERBASIS EKONOMI (EKSPOR) : Posisi Dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-Alat Analisis Regional*, 16(1), 41–53. <http://doi.org/10.22146/jieb.6802>